



ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ຂໍ້ສະເໜີ  
**DINAS PERHUBUNGAN**

ຄະນະ ສະຖານະ ກຽມບົດຄວາມ ກຽມບົດຄວາມ ກຽມບົດຄວາມ - ຄະນະ (ບໍລິຫານ)  
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA I NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235),  
ຮ່າງກຽມບົດຄວາມ (ບໍລິຫານ) ກຽມບົດຄວາມ ກຽມບົດຄວາມ  
TELEPON (0361) 224436, 227730  
WEBSITE: [www.dishub.baliprov.go.id](http://www.dishub.baliprov.go.id)

Bali, 20 Juli 2022  
Yth. Kepada  
Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Provinsi Bali  
di –  
Denpasar

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B.34.045.2/5716/SEKRET/DISHUB

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Bali	1 (satu) Gabung	Dengan hormat dikirim untuk dapat diproses lebih lanjut.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**KEPALA DINAS**  
**IGW. Samsi Gunarta**  
NIP. 19650807 199603 1 002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No.1  
Telp. (0361) 224436, 227730 Fax. (0361) 222436  
Denpasar (Bali), 80235

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2023**



**DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI BALI**



## KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 yang mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 - 2023, sehingga pembangunan dibidang transportasi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Bali, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali



**IGW. Samsi Gunarta**

Revisi Jabatan Muda (IV/c)

NIP. 19650807 199603 1 002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN</b>	
<b>LALU .....</b>	<b>13</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah.....	17
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>20</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	23
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Rencana Kerja Program Perangkat Daerah.....	30
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
5.1 Catatan Penting .....	35
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan .....	35
5.2 Rencana Tindaklanjut .....	36
<b>Lampiran .....</b>	<b>37</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya paradigma baru dalam kehidupan sosial politik, ekonomi di masyarakat, menuntut adanya perubahan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, menuju sistem pemerintahan yang baik dalam arti berdaya guna, berhasil guna, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegakan demokrasi dan keadilan (*Good Governance*).

Tuntutan cita-cita luhur tersebut akan dapat diwujudkan, apabila seluruh jajaran aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan memiliki akuntabilitas kinerja yang baik dalam arti arah kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai rencana maksud, tujuan yang jelas dan terarah, legalitas kewenangan, indikator sasaran yang terukur, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dalam arti bermanfaat bagi kepentingan publik.

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, sehingga sistem transportasi harus terus dibina, agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas barang dan jasa; mendukung pola distribusi nasional serta



mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan hubungan antar wilayah, nasional dan internasional dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan transportasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Adanya isu – isu strategis yang berkembang dalam sektor perhubungan antara lain :

- a. Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata – rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari.
- b. Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70 % dari total perjalanan.
- c. Terjadinya kemacetan lalu lintas dimana kecepatan rata – rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam.
- d. Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan yang sangat pesat hingga mencapai 12% per tahun, sedangkan pembangunan jalan baru hanya  $\pm$  1% per tahun.
- e. Kemampuan jalan masih terbatas, untuk dibeberapa ruas jalan masih dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.
- f. Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan di sekitar atau sepanjang jalan tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.
- g. Kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi dalam mendukung aksesibilitas arus barang dan penumpang belum dilaksanakan secara optimal;



- h. Kemampuan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, dan mendorong potensi ekonomi di daerah perdesaan masih terbatas.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024). Dalam pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antar daerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri, meningkatkan akses informasi kepada masyarakat dengan memberi hak informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah Provinsi Bali dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana dengan 5 (lima) bidang prioritas pembangunan Bali yaitu: (1) Bidang sandang dan pangan; (2) Bidang kesehatan dan pendidikan; (3) Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; (4) Bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya dan (5) Bidang pariwisata. Untuk mewujudkan kelima bidang tersebut transporsai mempunyai peran yang sangat penting



sebagai urat nadi pembangunan di Provinsi Bali yaitu dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan darat, laut dan udara secara teriteraksi dan terkoneksi. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Melakukan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur, strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang akan dilakukan pada misi kedelapan belas RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023 yakni “Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali”. Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan secara khusus di sektor transportasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bali perlu pula mengakomodir program – program yang selaras dengan Pemerintah Pusat. Selain itu perlu pula mengakomodir program – program dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013.



Untuk menunjang strategi dan arah kebijakan maka urusan perhubungan melaksanakan :

- 1) Pengembangan dan preservasi jaringan jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas pengguna jalan;
- 2) Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan serta peningkatan kendaraan yang berkeselamatan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan lalu lintas;
- 3) Revitalisasi angkutan umum, penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;
- 4) Optimalisasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Pembangunan/pengembangan/peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam mendukung keseimbangan dan konektivitas wilayah;
- 6) Penataan jaringan transportasi darat, laut dan udara antar kabupaten/kota.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyusun Rencana Akhir Kerja Tahun 2023 mengacu pada RKPD Dinas Perhubungan Provinsi Bali tahun 2023, yang merupakan turunan dan pelaksanaan dari Rencana Strategik Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang telah menyesuaikan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Bali tahun 2018 - 2023 serta mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6267);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali;



17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Akhir Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang diselaraskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dokumen perencanaan di atasnya yakni RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 dan Renstra. Renja disusun juga untuk menggambarkan secara umum capaian kinerja yang ingin dicapai untuk dapat ditransformasikan ke dalam Renja akhir PD dan Rencana Kerja Anggaran PD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD dan Renstra;
2. Mendeskripsikan tentang program/kegiatan baik prioritas maupun non prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dalam 1 tahun anggaran;
3. Menghasilkan kinerja yang baik dan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta akuntabel.



## 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
	2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
	2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
	2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENJA DAN PENDANAAN PD
BAB V	PENUTUP



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**  
**(TAHUN 2021)**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan 4 Program dan 9 kegiatan yang tersebar di seluruh Bidang dan UPTD. yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

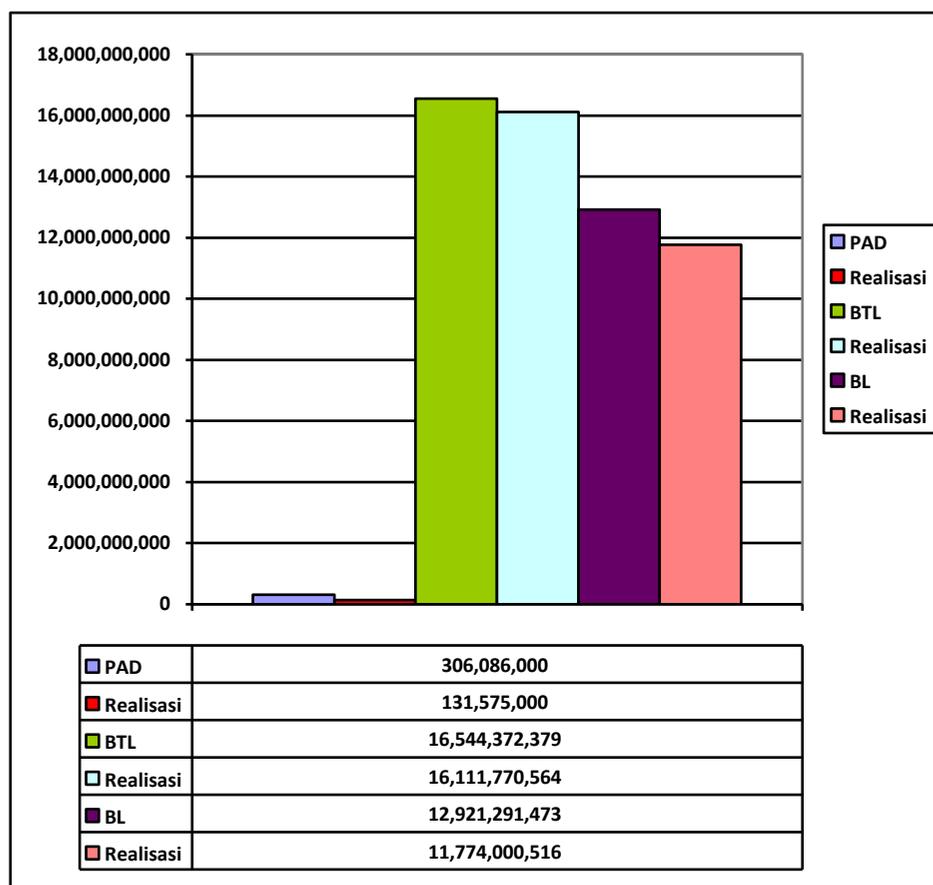
Berdasarkan tabel monitoring realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Bali per Desember tahun 2021 maka secara keseluruhan dapat kami laporkan Keuangan terealisasi sebesar 92,94% dari target 100%, Fisik terealisasi sebesar 100 % dari target sebesar 100%. Dari keseluruhan nilai rencana anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.26.895.197.905,- terealisasi sebesar Rp.24.997.087.913,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.898.109.992,-. Menurut laporan realisasi fisik dan keuangan dana APBD Periode Triwulan IV Tahun 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Bali (terlampir), keseluruhan pelaksanaan Renja tahun lalu dapat berjalan dengan baik.



**REKAPITULASI SEBARAN BELANJA LANGSUNG  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2021**

No.	Bidang/UPT.	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Sekretariat (46,37%)	1	6	12.555.301.864
2	Bidang Angkutan (2,47%)	1	1	671.281.848
3	Bidang Pelayaran (4,47%)	1	1	1.211.200.925
4	Bidang Lalu Lintas (3,33%)	1	3	903.760.912
5	Bidang Keterpaduan Moda (0,78%)	1	1	213.292.840
6	UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan (9,08%)	1	5	2.458.637.239
7	UPTD. Trans Bali / Trans Sarbagita (19,33%)	1	5	5.234.023.752
8	UPTD. Perlengkapan Jalan (7,12%)	1	4	1.927.808.780
9	UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan (7,01%)	1	5	1.899.889.745
<b>JUMLAH</b>			<b>31</b>	<b>27.075.197.905</b>

Target dan Realisasi PAD, BTL dan BL Dinas Perhubungan Prov. Bali Tahun 2021



Walaupun dalam laporan pencapaian target menunjukkan kondisi yang baik/ideal bukan berarti tidak terjadi permasalahan. Terdapat beberapa target yang tidak tercapai seperti penurunan target pendapatan, capaian kinerja dan lainnya yang perlu untuk disampaikan dan dianalisa. Beberapa faktor yang berpengaruh dapat disampaikan sebagai berikut;

- Pencapaian Target Pendapatan cukup jauh dari target yang disusun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni menurunnya pendapatan tiket bus Trans Sarbagita karena adanya kebijakan tiket gratis bagi pengguna pelajar/mahasiswa. Selain itu penurunan jumlah penumpang umum juga turut berdampak. Selain pendapatan Trans Sarbagita, pungutan retribusi Kartu Pengawasan juga mengalami sedikit penurunan jumlah pengurusan.
- Pencapaian Target Kinerja  
Beberapa Target Kinerja menunjukkan data tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh sebagai berikut;
  - a. Tidak tercapainya target indicator Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 belum dilakukan pengambilalihan operasional pelabuhan pengumpan regional. Sehingga target 100% belum dapat dilakukan pengukuran.
  - b. Tidak tercapainya target indicator Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pengguna jalan, dimana alokasi anggaran yang dipergunakan untuk melakukan penindakan belum cukup efektif untuk menimbulkan efek jera.
  - c. Tidak tercapainya target indicator Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan. Hal ini disebabkan oleh



tingkat pengurusan perijinan yang kurang patuh dan paham prosedur pengurusan perijinan.

### **Review Terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2021**

Mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021, dalam tahun anggaran berjalan belum dapat teramati dengan baik, mengingat pelaksanaan Program/Kegiatan sebagian besar belum berjalan. Namun dapat dikatakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 sudah mengakomodasi isi atau muatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2021.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu pada realisasi anggaran Belanja Langsung pada tahun 2021, secara umum dapat digambarkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan prioritas dapat terlaksana walaupun dengan kondisi yang kurang ideal. Pencapaian kinerja daripada Renja Tahun 2021 seperti pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan	3 dok	5 dok	133,3%
Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10	10	100%
Terwujudnya Transportasi yang lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu	100%
	Tingkat pelayanan di persimpangan	C	C	100%
	Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	100%	100%	0%
	Persentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	60%	73,00%	120%
	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional	12 Jam	12 Jam	100%
Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase lalu lintas angkutan jalan yang berkeselamatan	90%	82%	90%
	Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan	100%	100,00%	70,37%
Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100%	100%	100%



Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam pelayanan kepada publik memiliki SOP dan SPM. SOP pada pelayanan perijinan telah dijalankan dengan baik sesuai prosedur standar dan melayani 100% penatalaksanaan perijinan yang masuk. Sedangkan pada SPM Dinas Perhubungan telah menerapkan pada layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita, dimana SPM sendiri telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Capaian kinerja dari penerapan SPM Trans Sarbagita dapat dilihat dari pencapaian tingkat pelayanan angkutan Trans Sarbagita itu sendiri, dimana pada tahun 2021 dari target sebesar 60% tercapai 73% atau 166%.

### 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang sama. Isu – isu seperti keselamatan berlalu lintas, tingkat pelayanan ruas jalan, tingkat pelayanan angkutan umum, pemenuhan infrastruktur Perhubungan masih menjadi isu yang diangkat dan belum mendapat perhatian khusus.

Selaras dengan isu tersebut, beberapa juga merupakan isu yang diangkat ketingkat nasional oleh Kementerian Perhubungan, sehingga terjadi sinergitas Program baik dari tingkat Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah selain minimnya alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan, juga berasal dari beberapa permasalahan kewenangan yang belum diselesaikan serta permasalahan payung hukum yang belum jelas.

Dampaknya bila permasalahan itu tidak diselesaikan maka pemenuhan target kinerja yang berasal dari visi dan misi kepala daerah akan menjadi terganggu dan cenderung tidak terpenuhi. Sehingga diperlukan penelaahan yang lebih mendalam.



- c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

Saat ini Perangkat Daerah terus diminta untuk berinovasi terhadap peningkatan pelayanan kepada publik, melalui program-program kemasyarakatan dan program-program prioritas teknis yang akan memberikan dampak makro yang positif kepada masyarakat. Peluang untuk mewujudkan transportasi publik dan diharapkan dapat berkelanjutan, sedangkan pengembangan potensi lainnya seperti penyediaan infrastruktur penunjang transportasi Bali seperti Pelabuhan, Bandar Udara dan Terminal dapat dijadikan sebagai peluang untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Secara umum isi daripada Rancangan Akhir RKPD sudah dianalisis berdasarkan analisis kebutuhan, dimana usulan Program/Kegiatan yang ada didalam RKPD telah terakomodasi dengan baik pada Renja Perangkat Daerah.

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Penting
	Prog./Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Prog./Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	20.912.767.454	Program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	23.362.838.788	
2	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	242.150.340	Program Pengelolaan Keretaapian	9 Kab./Kota	Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	50	758.377.988	
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Rasio Konektivitas layanan angkutan	0,84	1.222.797.596	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9 Kab./Kota	Rasio Konektivitas layanan angkutan	0,84	1.339.107.404	
			Persentase terpenuhinya standar	72,51	561.848.468			Persentase terpenuhinya standar	72,51	1.101.821.428	



			pelayanan minimum angkutan					pelayanan minimum angkutan				
			Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	3.836.802.200			Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	79	3.959.999.540		
			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65	700.985.860			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan nasional	65	3.181.327.623		
4	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	1.366.617.510	Program Pengelolaan Pelayaran	9 Kab./Kota	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50	1.020.878.040		

Dari 4 program yang diusulkan dalam usulan akhir RKPD secara keseluruhan dapat terakomodasi. Namun dari pembiayaan yang diusulkan dalam usulan akhir RKPD belum dapat secara utuh terpenuhi mengingat keterbatasan keuangan Daerah, sehingga diperlukan analisa yang lebih mendalam terhadap Program/Kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 sesuai Permendagri 90 Tahun 2020, akan disampaikan pada Forum Perangkat Daerah yang akan diikuti oleh Seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Bali dan Instansi vertical / Balai Kementerian Perhubungan di Provinsi Bali, Bapeda Provinsi Bali, Instansi terkait, tokoh – tokoh masyarakat Transportasi, kalangan akedemisi, kelompok ahli dan Organisasi transportasi di Bali. Usulan dan masukan dari peserta forum selanjutnya akan ditelaah sehingga rancangan akhir renja akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terkait transportasi di Provinsi Bali.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah. Secara teknis juga telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. **Konektivitas Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan mengacu pada RPJMD Semesta Berencana provinsi Bali 2018-2023 tertuang pada Misi ke-18 yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

Adapun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru dengan Indikator Indeks Konektivitas (Rata-rata Waktu Tempuh Jam/100 Km)

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Transportasi)



Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, bersifat idealistik dan mengandung nilai – nilai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan merupakan arah perjalanan pemerintah dan pembangunan yang jelas berdasarkan kriteria – kriteria, akseptibilitas, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Sedangkan sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yakni suatu yang akan dicapai berdasarkan kebijakan, alokasi sumber daya, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yakni tahunan dan lima tahunan.

Agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai, maka sasaran yang ditetapkan harus bersifat spesifik, terukur, akuntabel dan menantang, tetapi dapat dilaksanakan dan berorientasi pada hasil sesuai sumber daya yang tersedia, tugas dan fungsi unit kerja. Dalam mendukung pencapaian RPJMD maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali juga menentukan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Perangkat sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Terwujudnya Transportasi yang Handal
- Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan
- Sasaran 2 : Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai
- Sasaran 3 : Terwujudnya Transportasi yang lancar
- Sasaran 4 : Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH								
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI								
TAHUN 2019-2023								
No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Transportasi yang Handal	Terwujudnya Sistem Transportasi yang berkelanjutan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan	3	3	3	3	3
		Terwujudnya Infrastruktur Perhubungan yang memadai	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	9	10	10	11	12
		Terwujudnya Transportasi yang lancar	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	C	C	C	C
			Tingkat Pelayanan di Persimpangan	C	C	C	C	C
			Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	40%	40%	50%	60%	80%
			Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	60%	65%	70%	75%	80%
			Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn
		Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Bali Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 merencanakan 4 Program, 34 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas)**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
  - 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
  - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



- 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 4.2 Pengadaan Mebel
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 5.1 Penyediaan jasa surat menyurat
    - 5.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
    - 5.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 6.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    - 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- A.2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. P2LLAJ)
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 1.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 2.1 Penyediaan jasa surat menyurat
    - 2.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- 2.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinth Daerah
  - 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### A.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. TRANS BALI/TRANS SARBAGITA)

- 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinth Daerah
  - 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### A.4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. PERLENGKAPAN JALAN)

- 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 1.2 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 2.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 3.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### A.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD. PENYELENGGARAAN PELABUHAN)

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.2 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
  - 1.3 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
  - 1.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
  - 2.1 Pengadaan Mebel
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 3.1 Penyediaan jasa surat menyurat
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 4.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

### **B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk jaringan jalan Provinsi



- 1.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
- 1.2 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- 1.3 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
- 1.4 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
  - 2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
  - 2.2 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
3. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
  - 3.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - 4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - 5.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - 6.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  - 7.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  - 7.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

### **C. Program Pengelolaan Pelayaran**

1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  - 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  - 2.1 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
  - 2.2 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

### **D. Program Perkeretaapian**

1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
  - 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian



Dinas Perhubungan dalam usulan Belanja Langsung dalam Renja Tahun 2023 mengusulkan 4 Program dan 27 Kegiatan dengan 89 Sub Kegiatan yang tersebar pada Sekretariat, Bidang dan UPTD. Sebaran lokasi pelaksanaan Program/Kegiatan teknis secara umum tersebar pada 9 Kabupaten/Kota sesuai usulan berdasarkan kewenangan serta lingkup koordinasi. Sedangkan Program/Kegiatan rutin perkantoran berlokasi di Denpasar. Berikut Rekapitulasi usulan pagu Program/Kegiatan pada Sekretariat, Bidang dan UPTD. dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang diusulkan dalam Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023.

No.	Bidang/UPT.	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat 63%	1	6	23	21.864.734.428
2	Bidang Lalu Lintas 4%	1	2	4	1.377.922.804
3	Bidang Angkutan 3%	1	3	3	1.101.821.428
4	Bidang Keterpaduan Moda 2%	1	1	1	758.377.988
5	Bidang Pelayaran 3%	1	1	1	1.000.718.040
6	UPTD. Pusat Pengendalian LLAJ 4%	2	4	11	1.606.900.380
7	UPTD. Trans Bali / Trans Sarbagita 13%	2	4	7	4.469.898.876
8	UPTD. Perlengkapan Jalan 6%	2	4	7	1.972.340.387
9	UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan 2%	2	5	10	571.636.480
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>34.724.350.811</b>



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rencana Kerja Program Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari arah kebijakan sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali dan Renstra Dinas Perhubungan, Tahun 2018 – 2023, maka rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mengacu pada Pemandagri 90 Tahun 2019 mengampu 4 Program yang dilaksanakan oleh 9 Bidang di dinas perhubungan Provinsi Bali, adalah terdiri dari :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Bali dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat dan bagian Katata Usahaan pada masing – masing UPTD.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	100%	23.362.838.788	APBD	24.792.011.910

- 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan oleh 7 program dimana 5 program di bidang dan 2 program di UPTD di Dinas Perhubungan Provinsi Bali yaitu Bidang Angkutan Jalan, Lalu Lintas Jalan, UPTD. Perlengkapan Jalan, UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UPTD



Trans Bali/Trans Sarbagita dengan atau diampu oleh 7 program yaitu:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	9 Kab./ Kota	0,78 Rasio	2.701.418.988	APBD	3.727.421.010
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional	9 Kab./ Kota	50%	38.815.400	APBD	93.750.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	9 Kab./ Kota	72,51%	852.812.728	APBD	1.100.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	9 Kab./ Kota	72,51%	57.946.900	APBD	150.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	9 Kab./ Kota	72,51%	191.061.800	APBD	100.000.000



Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)	9 Kab./ Kota	75%	3.959.999.540	APBD	4.356.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tingkat pelayanan ruas jalan	9 Kab./ Kota	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	1.780.200.639	APBD	3.047.000.000

Rincian kegiatan yang akan mendukung Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.
4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi.
7. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
8. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi.



9. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
10. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
11. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
12. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

**3** Program Pengelolaan Pelayaran akan dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelayaran dan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, indikator program yang akan menjawab Program Pengelolaan Pelayaran dengan rencana kebutuhan anggaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Program Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	9 Kab./ Kota	50%	1.000.718.040	APBD	3.500.000.000
Program Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	9 Kab./ Kota	50%	20.160.000	APBD	422.000.000



Rencana kegiatan yang mendukung terwujudnya Program Pengelolaan Pelayaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional.
3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
  
- 4** Program Pengelolaan Perkeretaapian diampu oleh 1 bidang keterpaduan moda dengan kegiatan pada tahun 2023 masih sebatas kajian – kajian dan koordinasi untuk mewujudkan transportasi menggunakan keretaapi diprovinsi Bali. Adapun indicator program dan rencana kebutuhan pagu yang akan di perlukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	9 Kab./ Kota	50%	758.377.988	APBD	2.000.000.000

Rencana kegiatan untuk mewujudkan Program Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Catatan Penting

Dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 ini, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif .

Mengingat sangat kompleksnya visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan kewenangan Provinsi pada bidang perhubungan masih sangat sedikit, maka kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan mencapai sasaran dengan baik jika ada dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Dukungan dalam bentuk kebijakan dan penganggaran sangat diharapkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran.

Dukungan penganggaran terhadap Program Prioritas dan pendukung keberhasilan pencapaian sasaran sangat diharapkan dapat konsisten dipertahankan, sehingga target dapat tercapai.

Dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas, maka diharapkan pelayanan jasa perhubungan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, teratur, aman, nyaman dan menjangkau keseluruhan wilayah sehingga mampu menunjang pembangunan Bali secara keseluruhan dan berkelanjutan.

#### 5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 mengacu pada Tata cara yang tertuang dalam Pemendagri nomor 90 Tahun 2019. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengacu pada Dokumen Perencanaan di atasnya yakni RPJMD 2018-2023 dan



Renstra Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 sesuai dengan prioritas sasaran.

### 5.3 Rencana Tindaklanjuti

Dengan tersusunnya Renja Akhir Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Bali, diharapkan mendapatkan gambaran untuk dijadikan salah satu referensi dalam penentuan pagu indikatif Dinas Perhubungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.



# LAMPIRAN

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023														
Unit Organisasi: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
Sub Unit Organisasi: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
2	15													
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										34.724.350.811		38.966.073.720		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>										21.864.734.428		22.968.131.760		
2	15	01	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									104.000.000	
2	15	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Persen	2 Dokumen	100 Persen	35.452.200	40.000.000
2	15	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Persen	1 Dokumen	100 Persen	12.061.000	18.000.000
2	15	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4.499.800	6.000.000
2	15	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Persen	1 Dokumen	100 Persen	7.499.700	10.000.000
2	15	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Persen	1 Dokumen	100 Persen	3.699.800	5.000.000
2	15	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Persen	1 Laporan	100 Persen	6.799.900	5.000.000
2	15	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Persen	1 Laporan	100 Persen	14.999.900	20.000.000
2	15	01	1,02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					17.740.236.000			18.026.250.000		
2	15	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	80 persen	96 Orang/ Bulan	100 persen	17.710.236.000	18.000.000.000
2	15	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	80 persen	1 Dokumen	100 persen	30.000.000	26.250.000
2	15	01	1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					722.806.900			788.500.000		
2	15	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Paket	100 Persen	4.618.500	5.500.000
2	15	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Paket	100 Persen	315.309.400	350.000.000
2	15	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Paket	100 Persen	80.000.000	85.000.000
2	15	01	1,06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Paket	100 Persen	5.375.000	7.000.000
2	15	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Dokumen	100 Persen	20.000.000	21.000.000
2	15	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	297.504.000	320.000.000



2	15	01	1,07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah</b>				<b>833.864.000</b>				<b>641.625.000</b>					
2	15	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	15 Unit	100 Persen	685.500.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	491.625.000
2	15	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	55 Paket	100 Persen	148.364.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	150.000.000
2	15	01	1,08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>				<b>622.721.132</b>				<b>756.000.000</b>					
2	15	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	5.500.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	6.000.000
2	15	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Persentase layanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	232.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	300.000.000
2	15	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	385.221.132	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	450.000.000
2	15	01	1,09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.860.094.096</b>				<b>2.651.756.760</b>					
2	15	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	23 Unit	100 Persen	770.365.792	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	1.035.000.000
2	15	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	45 Unit	100 Persen	49.960.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	45.000.000
2	15	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	5 Unit	100 Persen	1.039.768.304	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	1.571.756.760





Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																	
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengendalian LLAJ																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERUBUNGAN</b>											1.606.900.380			
2	15	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>											244.588.796			
2	15	01	1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											90.652.400		
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Paket	100 Persen	2.264.500	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	2.500.000
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Paket	100 Persen	52.761.900	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	99.500.000
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Paket	100 Persen	600.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	1.300.000
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	35.026.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	52.718.600
2	15	01	1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											44.302.148		
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	1.100.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	1.300.000
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	660.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	726.000
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	1 Laporan	100 Persen	42.542.148	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	45.564.363
2	15	01	1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											109.634.248		
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	2 Unit	100 Persen	94.204.248	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	99.000.000
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	84 Nilai	8 Unit	100 Persen	15.430.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	84 Nilai	16.500.000
2	15	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGRUTAN JALAN (LLAJ)</b>											1.362.311.584			
2	15	02	1.05	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>											1.362.311.584		
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Tingkat Pelayanan Sempang	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ctundaan simpang bersinyal 15- detik/kendaraan	1 Laporan	100 Persen	662.311.584	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Tingkat Pelayanan Sempang	0 Ctundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan	728.542.743
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa lalu lintas	Tingkat Pelayanan Sempang	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ctundaan simpang bersinyal 15- detik/kendaraan	1 Unit	100 Persen	700.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Tingkat Pelayanan Sempang	0 Ctundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan	1.375.000.000
<b>TOTAL</b>												<b>1.606.900.380</b>				<b>2.422.651.706</b>	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target				
2																		
2	15																	
2	15	01																
2	15	01	1,06															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										4.469.898.876			5.007.661.987					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										509.899.336			651.661.987					
Administrasi Umum Perangkat Daerah										121.633.800			212.828.110					
2	15	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur,	79 Persen	1 Paket	100 Persen	63.355.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	124.769.150	
2	15	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	79 Persen	1 Paket	100 Persen	58.278.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	88.058.960	
2	15	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										57.616.848			63.470.000
2	15	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	17.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 Persen	19.470.000	
2	15	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	39.916.848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 Persen	44.000.000	
2	15	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										330.648.688			375.363.877
2	15	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	100 Persen	6 Unit	100 Persen	325.088.688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	100 Persen	365.408.877	
2	15	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	100 Persen	29 Unit	100 Persen	5.560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai evaluasi manajemen kinerja	100 Persen	9.955.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										3.959.999.540			4.356.000.000
2	15	02	1,08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										3.959.999.540			4.356.000.000
2	15	02	1,08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)	Jumlah Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dalam Kondisi Baik dan Layak	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	75 Persen	8 Unit	100 Persen	3.959.999.540	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)	75 Persen	4.356.000.000	
TOTAL										4.469.898.876							5.007.661.987	



Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													1.972.340.387	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>													192.139.748	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									13.571.500			15.300.000	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	79 Persen	1 Paket	100 %		5.186.700	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Persen	6.000.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan Administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Persen	8 Laporan	100 %		8.384.800	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Persen	9.300.000
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									42.830.100			79.499.200	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	100 Persen	8 Unit	100 %		42.830.100	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 Persen	79.499.200
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									135.738.148			146.545.000	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	79 Persen	3 Unit	100 Persen		130.338.148	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Persen	140.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	79 Persen	8 Unit	100 Persen		5.400.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Persen	6.545.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									1.780.200.639			3.047.000.000	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi									1.780.200.639			3.047.000.000	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tingkat pelayanan ruas jalan	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	586 Unit	100 Persen		1.083.707.782	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pelayanan ruas jalan	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	2.340.000.000
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Tingkat pelayanan ruas jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	998 Unit	100 Persen		696.492.857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat pelayanan ruas jalan	C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	707.000.000
<b>TOTAL</b>										<b>1.972.340.387</b>			<b>3.288.344.200</b>	



Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur		Target
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													<b>571.636.480</b>	<b>1.033.765.000</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													<b>551.476.480</b>	<b>611.765.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>													<b>444.607.480</b>	<b>469.715.000</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	84 Nilai	1 Paket	100 persen	49.609.400	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	55.000.000
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Jumlah dokumen Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	84 Nilai	1 Paket	100 persen	1.713.600	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	1.715.000
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	84 Nilai	1 tahun	100 persen	3.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	3.000.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Jumlah Dokumen pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	84 Nilai	1 dokumen	100 persen	390.284.480	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	410.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													<b>45.879.000</b>	<b>50.000.000</b>
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	84 Nilai	1 Paket	100 persen	45.879.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	50.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Jumlah materi tersedia untuk administrasi perkantoran	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	84 Nilai	150 Lembar	100 persen	1.650.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	1.650.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>59.340.000</b>	<b>90.400.000</b>
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Semua kecamatan, Semua Kelurahan	84 Nilai	2 Unit	100 persen	53.940.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	85.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	presentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	84 Nilai	8 Unit	100 persen	5.400.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84 Nilai	5.400.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>													<b>20.160.000</b>	<b>422.000.000</b>
<b>Pembangunan, Penerimaan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>													<b>20.160.000</b>	<b>422.000.000</b>
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase perubahan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	Jumlah pengawasan operasional pelabuhan regional	terlaksananya pengawasan, Pengoperasian, dan pemeliharaan pengumpan regional	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit, Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	50 persentase	3 Pelabuhan	50 persen	10.080.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase perubahan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50 persentase	22.000.000
2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase perubahan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	Jumlah laporan pengawasan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional	terlaksananya pengawasan, Pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit, Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	50 persentase	17 laporan	50 persen	10.080.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase perubahan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM	50 persentase	400.000.000
<b>TOTAL</b>										<b>571.636.480</b>				<b>1.033.765.000</b>





5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Evaluasi dan pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Peraturan Daerah Provinsi Bali (2-76/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Scanned with CamScanner



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (3-77/2019) Tmbahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali unit pelaksana teknis daerah di lingkungan dinas perhubungan provinsi bali.
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Bali Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
  - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
  - c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Sub Bagian Penyusunan Program, Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Bali; dan
  - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Scanned with CamScanner



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Januari 2022



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
5. Yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI  
TANGGAL 03 Januari 2022 NOMOR 16/DISHUB/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
Anggota :  
1. Kepala Bidang Keterpaduan Moda Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
2. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
3. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
4. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
5. Kepala UPTD. Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
6. Kepala UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.  
7. Kepala UPTD. Trans Bali / Trans Sarbagita Dinas Perhubungan Provinsi Bali  
8. Kepala UPTD. Penyelenggaraan Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Bali  
9. Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS  
PEMERINTAH PROVINSI  
DINAS PERHUBUNGAN  
Ir. Yohanes Harta, M.Appl.SC  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650807 199603 1 002

Scanned with CamScanner



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEDUA	:	Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
KETIGA	:	Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I dan II) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali ini; dan
KEEMPAT	:	Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPД Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2023

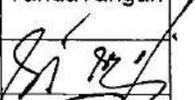
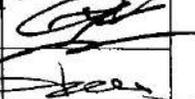
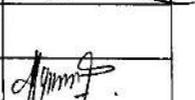
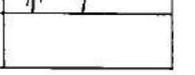
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 22 Pebruari 2022  
Pimpinan Sidang  
Kepala Dinas

  
IGW Samsi Gunarta.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650807 199603 1 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	TandaTangan
1	IGW Samsi Gunarta	Dishub Provi-Bali	Kepala Dinas	
2	AA NGL EST PRYANGA	Diprod Prov. Bali	Sub Koordinator	
3	Ketut. P. Wahanu.	Palece	Mejaba	
5	DESAK PUTU YUARDANI	staf Eunprog	Staf	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE